

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Indonesia Siap Menjadi Produsen Halal Dunia

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi pusat produsen halal dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, swasta, BUMN, organisasi kemasyarakatan, dan publik secara umum.

"Melalui webinar ini diharapkan para pemangku kepentingan bisa duduk bersama, bersinergi, serta mencari yang solusi terbaik dengan mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia," ujar Agus.

Agus pun menjelaskan, industri halal memiliki peran yang cukup signifikan atas performa positif neraca perdagangan. Pada periode Januari—Agustus 2020, kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan negarane-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menunjukkan performa positif dengan mencatatkan surplus sebesar USD 2,46 miliar.

Pada periode tersebut Indonesia mampu membukukan ekspor ke negara OKI sebesar USD 12,43 miliar. Dari nilai ekspor tersebut, tiga produk yang tertinggi adalah minyak kelapa sawit (23,88 persen), batu bara (9,56 persen), dan bagian kendaraan bermotor (3,95 persen).

Secara ukuran pasar, negara-negara OKI merupakan pasar yang luar biasa besar. Terdiri atas 57 negara anggota, dengan total populasi muslim sebesar 1,86 miliar jiwa atau sekitar 24,1 persen dari total populasi dunia. Jumlah populasi ini belum termasuk pemeluk agama Islam di luar negara anggota OKI, seperti India dengan jumlah muslim sebesar 195 juta jiwa dan Ethiopia dengan jumlah muslim sebesar 35,6 juta jiwa.

"Sebagian besar negara anggota OKI dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tuntutan standar pemenuhan atas jaminan produk halal yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan negara-negara OKI sebagai pasar dengan peluang yang besar," kata Agus.

Lebih lanjut, menurut Agus, ekspor produk Indonesia ke negara berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat dilepaskan dari peran produsen produk halal Indonesia, khususnya untuk produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Ketiga produk ini berkontribusi sebesar total senilai sebesar 7,42 persen terhadap impor produk halal dunia.

"Tren impor produk halal negara OKI periode 2015—2019 cenderung meningkat 5,27 persen. Namun demikian, pangsa pasar ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI masih harus dapat dimaksimalkan," jelas Agus.

Agus pun menjelaskan, Kementerian Perda-

gangan memiliki beberapa strategi peningkatan ekspor produk halal. Strategi ini menggabungkan berbagai instrumen yang tersedia. Pertama, dengan memanfaatkan instrumen kebijakan, seperti kebijakan relaksasi ekspor-impor untuk produk halal tujuan ekspor.

Kedua, dengan menguatkan akses pasar produk halal Indonesia di pasar luar negeri. Ketiga, dengan menyiapkan berbagai program untuk penguatan pelaku usaha ekspor produk halal. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan turut serta dalam fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.

Sertifikasi halal ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Kementerian Perdagangan juga memberikan bimbingan teknis legalitas usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Selain itu, Kementerian Perdagangan menyediakan fasilitasi sertifikasi halal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Langkah konkret lain dalam meningkatkan ekspor produk halal adalah melalui peningkatan akses pasar ke mancanegara. Diharapkan produk Indonesia dapat masuk secara leluasa ke pasar ekspor suatu negara tanpa terkendala hambatan tarif maupun hambatan nontarif," harap Agus. 



SELAR PRODUK INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DENPASAR : Pedagang melayani calon pembeli dalam Gelar Produk Industri dan Perdagangan Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, Rabu (4/11/2020). Kegiatan yang digelar pada 3-6 November 2020 tersebut diikuti 40 pelaku industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 sekaligus mempromosikan produk secara online ataupun offline.

Juru Timbang dan Reparatur UTTP Wujudkan Satu Nusa Satu Ukuran

Purwakarta - Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perdagangan melalui pelatihan dan pendidikan bagi 1.000 juru timbang dan reparatur alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) untuk mewujudkan "Satu Nusa Satu Ukuran". Program ini sekaligus merupakan inovasi Kementerian Perdagangan dalam mencapai tujuan tertib ukur.

NERACA

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan untuk mewujudkan 'Satu Nusa Satu Ukuran' diperlukan SDM yang mumpuni. Untuk itu, Kemendag berkomitmen melatih 1.000 juru timbang dan reparatur UTTP yang ditargetkan dapat tercapai hingga akhir 2021.

"Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari peningkatan tata kelola manajemen pasar dan peningkatan tertib ukur," ungkap Agus saat membuka Pelatihan Reparatur Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sekaligus Pelatihan Pembuka (Kickoff) 1.000 Juru Timbang dan Reparatur secara Nasional di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Agus menjelaskan, pelatihan juru timbang bertujuan untuk membentuk SDM juru timbang yang mampu bertugas untuk

mencatat jenis dan jumlah UTTP, memberikan informasi mengenai pelaksanaan atau terulangnya penggunaan UTTP, serta mengelola pos ukur ulang.

Sedangkan pelatihan reparatur bertujuan untuk membentuk kompetensi SDM di bidang metrologi yang mampu mereparasi atau memperbaiki UTTP.

"Selain menciptakan SDM perdagangan, pelatihan ini diharapkan menambah peluang lapangan kerja terutama di bidang metrologi dan pelayanan kemitrologi di kabupaten/kota dapat terselenggara dengan baik," kata Agus.

Agus juga menyampaikan, Indonesia baru saja menerima penghargaan dari Organisasi Internasional untuk Metrologi Legal (OIML) tahun 2020 yaitu "OIML Award for Countries and Economic with Emerging Metrology System".

Hingga akhir 2019 telah terdapat 1.621 pasar atau

sekitar 10,35 persen yang memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur. Pada pasar tersebut alat ukur, takar, dan timbang yang digunakan dalam transaksi perdagangan telah sesuai ketentuan, yang salah satunya adalah telah bertanda tera sah yang berlaku.

"Jumlah Pasar Tertib Ukur dari tahun ke tahun diharapkan terus bertambah. Ini menjadi tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan pasar yang tertib dalam hal ukuran, takaran, dan timbangan sebagai langkah awal terciptanya daerah tertib ukur. Inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci sukses tercapainya sasaran strategis tersebut," jelas Agus.

Agus juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang secara aktif membangun metrologi legal melalui berbagai inovasi. "Diharapkan hal ini dapat diikuti daerah lainnya dan masih dengan semangat Hari Sumpah Pemuda dapat mewujudkan Satu Nusa Satu Ukuran," harap Agus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menambahkan pembangunan SDM merupakan salah satu kunci penataan tata laksana penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, khususnya dalam mewujudkan tertib ukur dalam kerangka perlin-

dungan konsumen dan tertib niaga. Pembangunan SDM tersebut meliputi SDM aparatur dan SDM non-aparatur sipil negara.

Hingga saat ini, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia sudah terbentuk 335 unit metrologi legal. Jumlah ini akan terus bertambah tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari jumlah SDM yang menjadi bagian dari pembangunan SDM di bidang metrologi legal berbasis kompetensi.

"Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemitrologian (PPSDK) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis bagi SDM aparatur maupun non-aparatur sipil negara. Pelatihan-pelatihan yang diberikan PPSDK diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada standar kompetensi dan juga berdasarkan kebutuhan yang disusun bersama dengan Direktorat Metrologi," terang Suhanto.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Angrijono menyambut baik pelatihan Juru Timbang dan Reparatur secara nasional. Dengan jumlah pasar mencapai 15 ribu unit di seluruh Indonesia, apabila ditempatkan satu orang juru timbang atau reparatur melalui pelatihan ini, akan membuka peluang usaha di bidang jasa reparasi. Hal ini akan

mendorong terciptanya pasar tertib ukur dimana UTTP akan terkontrol secara masif.

"Dengan demikian, jumlah Pasar Tertib Ukur dapat bertambah secara signifikan. Ditjen PKTN akan terus mendukung upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan pelaku-pelaku usaha yang bertanggung jawab," ujar Veri.

Bupati Anne Ratna menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengapresiasi dukungan dari Kementerian Perdagangan bagi kemajuan pengembangan metrologi legal di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta telah melakukan terobosan dengan menggandeng ibu-ibu PKK untuk menyukseskan kepedulian terhadap ukuran, takaran, dan timbangan pada saat berbelanja di pasar melalui program Ceu Ati yaitu Cek Ukuran Akurasi Timbangan.

"Selanjutnya, Purwakarta akan mengoptimalkan pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya di bidang reparasi UTTP yang saat ini sedang dilakukan. Walaupun UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purwakarta baru beroperasi, kami akan terus mengembangkan metrologi legal sehingga Kabupaten Purwakarta dapat menjadi Daerah Tertib Ukur," pungkaskan Anne. 



KENAIKAN HARGA CABAI PICU INFLASI OKTOBER : Pedagang berjualan cabai merah di pasar tradisional Peunayung, Banda Aceh, Aceh, Rabu (4/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Oktober 2020 sebesar 0,07 persen di sejumlah kabupaten/kota, salah satu yang dominan menjadi penyebab yakni kenaikan harga cabai merah menyumbang inflasi 0,09 persen dan bawang merah sebesar 0,02 persen.

Ekspor Bahan Baku Obat Hewan Sediaan Premiks Menembus Eropa dan Asia

NERACA

Pasuruan - Pemerintah melepas ekspor perdana bahan baku asal hewan sediaan premiks dalam hal ini Feed Supplement yang berupa Tryptophan Granule (asam amino pakan hewan) produksi PT. Cheil Jedang Indonesia. Total ekspor yaitu sebanyak 327 ton dengan nilai USD 1,5 juta atau sekitar Rp 22,5 miliar.

Ekspor kali ini menyoar pasar Eropa dan Asia, yaitu ke Jerman, Inggris, Vietnam, India Prancis, Polandia dan Belanda. Hal ini membuktikan bah-

wa produk asam amino yang diproduksi di Indonesia sudah bisa diterima dan sesuai dengan standar internasional.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, kebutuhan asam amino dalam negeri rata-rata pertahun sebanyak 53.226 ton dengan kapasitas produksi dalam negeri kita sebesar 381.500 ton. Maka, ada potensi ekspor asam amino sebesar 32-8.274 ton dan sampai dengan bulan September 2020 sudah terealisasi ekspor sebanyak 119.496 ton.

Ekspor dan investasi yang terus ditingkatkan,

sebab hal itu kunci penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Dengan ekonomi yang tumbuh, diharapkan dapat menekan ketimpangan, kesenjangan dan kemiskinan.

"Karena itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi lompatan kemajuan dari PT. Cheil Jedang Indonesia yang pertama kalinya melaksanakan ekspor bahan asal hewan berupa asam amino. Saya berharap PT. Cheil Jedang Indonesia terus meningkatkan kinerja ekspornya di pasar internasional," papar Syahrul. 

Program B30 demi Industri Kelapa Sawit Nasional

NERACA

Jakarta - Pemerintah berkomitmen terus mendukung keberlanjutan pelaksanaan program mandatori biodiesel (B30).

"Target luasan lahan tersebut diikuti kenaikan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan, yaitu Rp30 juta per ha atau naik Rp5 juta per ha dari sebelumnya sebesar Rp25 juta per ha," ungkap Airlangga. Seperti diketahui, dipenghujung tahun 2019 kemarin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan program biodiesel 30 persen (B30).

Peluncuran B30 ternyata tidak hanya menghemat devisa hingga Rp 63 triliun per tahun. Berikut kelebihan B30. Pemerintah optimis biodiesel atau Biosolar 30 persen (B30) yang merupakan campuran dari 30 persen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dan 70 persen minyak solar, mampu meningkatkan daya kerja mesin untuk kendaraan berkapasitas 3,5 ton, hal ini dikarenakan tingginya angka cetane (CN) yang terkandung dalam B30.

Mengutip laman Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM, solar memiliki cetane number (CN) 48, sedangkan minyak sawit CN 41.

Jika komposisi itu digabungkan maka akan membentuk B30. Perlu diketahui, semakin tinggi angka CN, maka bahan bakar akan lebih mudah terbakar.

Namun angka CN yang tinggi pada B30 tidak serta merta membuat performa mesin meningkat. Mengingat, nilai kalor yang dimiliki B30 sedikit lebih rendah daripada solar dan sifat alamiah biosolar mudah berubah menjadi gel (menggumpal) jika terkena udara dingin.

"B30 ini sudah diujicobakan sejak November lalu, dan hari ini kita sampekan B30 sudah kita luncurkan. Dengan adanya B30 ini, bisa menghemat devisa hingga Rp 63 triliun," kata Presiden Jokowi.

Menurut beberapa penelitian, kandungan FAME ini didapatkan dari kelapa sawit yang diolah menjadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yaitu bahan bakar

tabati. Sehingga B30 ini telah diimplementasikan pada awal 1 Januari 2020, akan memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021.

Bahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa program B30 tidak akan memengaruhi kebijakan harga jual B30 atau yang dikenal sebagai biosolar di masyarakat. Artinya, biosolar tetap beredar, yakni Rp 5.150 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menambahkan telah mengemukakan stok B30 dalam jumlah yang cukup. Total stok B30 tercatat 509 ribu kilo liter (KL) dengan penyaluran harian mencapai 66 ribu KL.

Stok tersebut merupakan persediaan di TBBM, belum termasuk stok di kilang dan kapal.


"Memasuki tahun baru 2020, seluruh SPBU Pertamina telah siap menjual B30. Masyarakat bisa menikmati B30 melalui produk biosolar dan Dexitel.



Kelebihan B30 adalah lebih ramah lingkungan dan bersahabat dengan mesin kendaraan," terang Fajriyah.

Sekedar catatan, saat ini pemerintah sedang memantapkan tahap penyesuaian semisal menyiapkan depo. Pertamina juga sudah berkomitmen untuk bahan bakar dari CPO.

Kebijakan ini didukung keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahkan tidak hanya B30, rencana membuat bahan bakar lainnya mulai terwujud.

ITB yang ditunjuk pemerintah melakukan penelitian bahan bakar dari CPO sudah menemukan teknologi. Bahkan RON yang diciptakan hingga 120, melebihi Pertamina. 

 victoria insurance PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Perseroan")	 victoria insurance PT VICTORIA INSURANCE TBK ("The Company")
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM	NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
Dengan ini kami beritahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020.	It is herewith informed to all shareholders of the Company ("Shareholders") that the company will conduct Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Monday, December 14 th , 2020.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat paling kurang akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web E-RUPS, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada hari Kamis, 5 November 2020.	In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulations No. 15/POJK/04/2020 regarding the Planning and Organizing of Shareholders General Meeting, Invitations to the Meeting will be announced on Thursday, November 5 th , 2020 in 1 (one) Indonesian language national newspaper, the website of e-RUPS, the website of Indonesia Stock Exchange, and the website of the Company.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2020.	Shareholders eligible to attend the Meeting are the Shareholders recorded in the Company's Shareholders List on November 19 th , 2020.
Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikdinya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan oleh Perseroan.	Recommendations proposed by any shareholder of the Company will be included in the agenda of the Meeting if comply to the requirements regulated in article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and such recommendations must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the Invitation.
Jakarta, 5 November 2020 Direksi Perseroan	Jakarta, November 5 th 2020 Board of Directors